

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan signifikan akibat pertumbuhan populasi yang pesat. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2023 mencapai 278,7 juta jiwa, mengalami peningkatan sebesar 1,05% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Dalam Ilmu Ekonomi kependudukan, pertumbuhan populasi ini berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor ketenagakerjaan.

Salah satu permasalahan utama yang timbul dari dinamika kependudukan ini adalah tingkat pengangguran. Pengangguran merujuk pada kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan masih aktif mencari pekerjaan. Fenomena ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang terus bertambah dan kapasitas pasar tenaga kerja dalam menyerapnya. Perbedaan laju pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan tantangan yang kompleks. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk menciptakan peluang kerja, pertumbuhan lapangan pekerjaan sering kali tidak cukup untuk menampung seluruh tenaga kerja yang ada. Akibatnya, tingkat pengangguran

mengalami peningkatan, yang dapat memicu dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas (Keynes, 1936).

Tingkat Pengangguran di Indonesia merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja. Ketika angka Tingkat Pengangguran meningkat, hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan, kriminalitas, serta memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Tingkat Pengangguran bukan hanya sekadar masalah ekonomi; ia juga merupakan isu sosial yang kompleks, di mana banyak faktor yang saling berinteraksi berperan dalam menentukan Tingkat Pengangguran. Ketidakcocokan antara jumlah angkatan kerja yang meningkat dan lapangan pekerjaan yang terbatas menciptakan kesenjangan yang dapat memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan risiko kemiskinan (Keynes, 1936).

Menurut Todaro (2003), tingkat pengangguran memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan. Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat pemenuhan kebutuhan dasar dan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan. Keberhasilan suatu perekonomian dapat dievaluasi melalui tiga indikator utama, yaitu output, tingkat pengangguran, dan inflasi. Ketiga variabel makroekonomi ini memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Ketika output riil suatu negara melampaui kapasitas output potensialnya, inflasi cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam prosesnya, penggunaan tenaga kerja meningkat guna mendorong output agar melampaui batas potensialnya. Hubungan negatif antara

kesenjangan output riil dan output potensial terhadap tingkat pengangguran dijelaskan dalam hukum Okun (Darman, D. 2013).

Ketika masyarakat berpindah dari daerah pedesaan ke perkotaan, hal ini dapat menjadi masalah dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di kota. Hal inilah yang menyebabkan angka pengangguran meningkat. Konsentrasi pembangunan di perkotaan dan stagnannya sektor pembangunan di pedesaan juga menjadi faktor penyebab tingginya angka pengangguran. Namun, tidak ada jaminan seseorang yang pindah ke kota akan mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, urbanisasi seringkali dilakukan tanpa memperhitungkan psikologi. Namun pembangunan daerah—yakni pembangunan yang tidak dilakukan di seluruh wilayah secara serentak namun sering terpusat pada pertumbuhan kota dan sisanya pembangunan desa—merupakan penyebab utama migrasi penduduk ke kota. (Replita, 2016).

Menurut Dhoni et al. (2023), pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi masih berupaya mencari pekerjaan. Dalam hal ini, tingkat pengangguran mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, mencoba merintis usaha, atau tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan (Keynes, 1936).

Berdasarkan data dari BPS (2024), meskipun tren tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angkanya masih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2015, tingkat

pengangguran nasional Indonesia mencapai sekitar 6%, sedangkan negara-negara tersebut memiliki tingkat pengangguran di bawah 4%.

Data Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan rata-rata sebesar -0,04% per tahun. Dalam Teori Malthus, penurunan ini mencerminkan lambatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi, terutama bagi kelompok usia produktif yang semakin menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Walaupun persentase penurunannya relatif kecil, dampaknya cukup signifikan terhadap sektor ekonomi.

Di sisi lain, tingkat pengangguran justru mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,75% per tahun dalam periode yang sama. Kenaikan ini menunjukkan tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, khususnya di wilayah perkotaan yang mengalami urbanisasi pesat. Keterbatasan daya serap pasar tenaga kerja terhadap jumlah angkatan kerja yang terus bertambah menyebabkan lonjakan angka pengangguran, yang pada akhirnya dapat memperburuk masalah sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan dan penurunan kualitas hidup. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih mampu bersaing di pasar kerja (Malthus, 1986).

Kondisi Tingkat Pengangguran yang tinggi menjadi indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan permintaan pasar. Ketika jumlah orang yang siap

bekerja jauh melampaui jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, kesenjangan ini menyebabkan banyak individu tetap berada dalam status Tingkat Pengangguran. Ketidakseimbangan ini sering disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lambat, perkembangan teknologi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia, serta ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri yang terus berubah (Keynes, 1936).

Pengaruh tingkat pengangguran terhadap masyarakat sangat besar dan rumit. Selain kehilangan sumber uang yang dapat diandalkan, kehilangan pekerjaan juga mempersulit seseorang untuk membayar kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan perumahan. Hal ini sering menjadi pemicu munculnya masalah sosial yang lebih besar, termasuk meningkatnya angka kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan memburuknya kohesi sosial. Tingkat Pengangguran yang tinggi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial, meningkatkan risiko tindakan kriminalitas akibat tekanan ekonomi, serta memperburuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Tingkat Pengangguran yang meluas dapat memperkuat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan risiko gejolak sosial dan ketidakstabilan politik. Dalam konteks yang lebih luas, Tingkat Pengangguran yang kronis berpotensi mengganggu proses pembangunan ekonomi dan sosial, serta memperburuk ketidakadilan struktural dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan demikian sesuai dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan, masalah Tingkat Pengangguran tidak dapat dilihat hanya dari segi

ekonomi, tetapi harus dipahami sebagai isu multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya.

Dalam analisis lebih lanjut, Tingkat Pengangguran di Indonesia juga berkaitan dengan faktor-faktor struktural dan sosial yang lebih luas. Proses pembangunan dan potensi demografi bangsa yang seharusnya menjadi aset bisa saja terhambat akibat bertambahnya jumlah penduduk yang tidak didukung oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai. Tingginya Tingkat Pengangguran, sebagai salah satu dampak dari ketidakseimbangan ini, memiliki implikasi signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan di berbagai wilayah. Tingkat Pengangguran yang meluas tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga memperlemah daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan social (Keynes, 1936).

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah melalui kebijakan yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, tingkat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan tidak seragam di semua wilayah. Todaro & Smith (2015), Variabel-variabel seperti distribusi pendapatan, pertumbuhan populasi, dan tingkat urbanisasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan.

Keberhasilan upaya penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik, serta pertumbuhan populasi yang tidak seimbang dengan kapasitas penyediaan pekerjaan akan memperburuk dampak Tingkat Pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif dalam mengatasi masalah ini, dengan memadukan strategi pembangunan ekonomi dengan kebijakan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan dugaan sementara penulis, ternyata isu Tingkat Pengangguran di Indonesia merupakan isu yang mendesak dan perlu mendapatkan perhatian serius. Selain itu, tingkat pengangguran memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda selain terjadi pada tingkat nasional. Daerah perkotaan biasanya memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan (Doni et al., 2023b), di mana konsentrasi industri dan pencari kerja yang lebih besar sering kali tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2019 hingga 2023 (BPS Provinsi Jambi, 2024), Provinsi Jambi dipilih sebagai lokus penelitian karena menunjukkan beberapa indikator yang signifikan terkait permasalahan Tingkat Pengangguran. Rata-rata TPT di Jambi selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 4,68%, yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera Bagian Selatan, seperti Bengkulu dengan TPT rata-rata 3,60% dan Lampung dengan 4,43%. Fluktuasi TPT di Jambi juga menandakan adanya dinamika pasar tenaga

kerja yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada tahun 2020 dan 2021 di mana TPT Jambi mencapai 5,13% dan 5,09% angka yang menunjukkan dampak serius pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di wilayah ini.

Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera Bagian Selatan, Provinsi Jambi menempati posisi menengah. Namun, provinsi ini masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang lebih serius dibandingkan dengan Bengkulu, yang memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) terendah di kawasan tersebut. Meskipun angka TPT Jambi mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 4,59% dan 4,53%, permasalahan pengangguran tetap menjadi isu utama yang memerlukan analisis lebih lanjut. Tingginya tingkat TPT mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan peluang kerja yang mampu diserap oleh pasar tenaga kerja lokal.

Pemilihan Provinsi Jambi sebagai fokus penelitian juga didasarkan pada karakteristik ekonomi dan sosial yang unik, yang berbeda dari provinsi lainnya di Sumatera Bagian Selatan. Struktur ekonomi Jambi yang belum berkembang secara optimal, keterbatasan kesempatan kerja di sektor-sektor formal, dan keterampilan menjadi faktor-faktor utama yang diyakini berkontribusi terhadap tingginya Tingkat Pengangguran. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan provinsi seperti Sumatera Selatan, yang memiliki rata-rata TPT 4,75%, Jambi masih berada pada posisi yang sedikit lebih rendah. Namun, perbedaan ini menegaskan perlunya analisis yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor lokal yang mempengaruhi dinamika pasar kerja di Provinsi Jambi.

Selain itu, tingginya angka TPT di Jambi tidak hanya berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pengangguran, tetapi juga berpotensi memperparah tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Jambi serta merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan efektif di tingkat regional Sumatera Bagian Selatan, serta mendukung upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Tabel 1. 1 Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi tahun 2019 – 2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jambi
2019	4.19
2020	5.13
2021	5.09
2022	4.59
2023	4.53

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tabel 1.1, terlihat bahwa TPT di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, TPT tercatat sebesar 4,06 persen dan meningkat menjadi 4,68 persen pada tahun 2023. Permasalahan pengangguran ini menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, karena meskipun jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset dalam pembangunan, tanpa pengelolaan yang efektif, hal tersebut justru dapat menjadi beban.

Tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Jambi merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor saling terkait. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial serta memperlebar kesenjangan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pengangguran di Provinsi Jambi menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, karena angka pengangguran mencerminkan tingkat kesejahteraan yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi. Tabel berikut menyajikan data tingkat pengangguran di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun 2019 hingga 2023.

Kota Jambi dipilih sebagai lokus penelitian karena pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, di mana tingginya arus urbanisasi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Hal ini menjadikan Kota Jambi sebagai daerah dengan masalah Tingkat Pengangguran yang paling serius, dibandingkan kabupaten lain yang cenderung memiliki Tingkat Pengangguran lebih rendah dan stabil. Data ini menunjukkan bahwa Kota Jambi merupakan wilayah yang paling relevan untuk diteliti dalam konteks Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi.

Kota Jambi, sebagai ibu kota Provinsi Jambi, telah mengalami peningkatan signifikan dalam angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi tahun 2024, TPT di kota ini menunjukkan fluktuasi sepanjang periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, angka TPT tercatat sebesar 6,72%, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020 menjadi 10,49% dan

sedikit meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 10,66%. Namun, dalam dua tahun terakhir, tren pengangguran mulai menunjukkan penurunan, dengan angka 8,95% pada tahun 2022 dan semakin berkurang menjadi 8,27% pada tahun 2023.

Tingginya angka Tingkat Pengangguran di Kota Jambi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Tingkat Pengangguran yang meluas sering kali berujung pada peningkatan angka kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, serta meningkatnya kriminalitas di wilayah tersebut. Hubungan antara Tingkat Pengangguran dan masalah sosial ini perlu dipahami secara komprehensif agar pemerintah kota dapat merespons dengan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial Tingkat Pengangguran, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik untuk mengatasi Tingkat Pengangguran serta implikasi sosial-ekonominya di Kota Jambi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 Kota Jambi, penulis memilih Kota Jambi sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji fenomena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pemilihan ini didasarkan pada beberapa alasan utama, salah satunya adalah peran Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi serta administrasi pemerintahan. Namun, tingginya angka pengangguran di wilayah ini mencerminkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi di Kota Jambi belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan analisis

lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ini serta merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di berbagai daerah.

Kota Jambi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di provinsi, yang mengakibatkan persaingan dalam mencari pekerjaan menjadi semakin intensif. Proses urbanisasi yang cepat meningkatkan tekanan pada pasar tenaga kerja perkotaan, memperumit persoalan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana urbanisasi dan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan memengaruhi Tingkat Pengangguran di Kota Jambi, serta menawarkan solusi yang relevan.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Studi yang dilakukan oleh Suroya & Erdkhadifa (2023), Astuti et al. (2019), dan Lestari & Woyanti (2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh besar terhadap tingkat pengangguran. Ketiga penelitian tersebut menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja menjadi faktor utama tingginya angka pengangguran. Ketika jumlah penduduk usia produktif terus bertambah, tetapi lapangan kerja tidak berkembang secara proporsional, maka jumlah pengangguran cenderung meningkat (Malthus, 2015).

Selain faktor demografi, Hasibuan (2023), Qamariyah et al. (2022), dan Suroya & Erdkhadifa (2023) mengkaji hubungan antara Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dengan tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, meskipun dengan arah yang berbeda-beda. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan kerja dapat menyebabkan lonjakan pengangguran karena tenaga kerja yang lebih terampil mencari pekerjaan dengan standar yang lebih tinggi. Namun, dalam beberapa konteks, kenaikan IPM justru membantu menurunkan tingkat pengangguran ketika perbaikan kualitas tenaga kerja diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja. Oleh karena itu, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran sangat bergantung pada dinamika ekonomi lokal dan kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan di suatu wilayah.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Pasuria & Triwahyuningtyas (2022), Simbolon et al. (2023), dan Putra & Hidayah (2023) mengungkapkan bahwa kebijakan upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Kenaikan upah minimum meningkatkan daya beli tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Studi ini menegaskan bahwa kebijakan upah minimum yang tepat dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi pengangguran, terutama jika didukung oleh kebijakan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, penelitian oleh Azis et al. (2021), Syahputra et al. (2019), dan Syahril (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengangguran terbuka. Seiring dengan

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, lebih banyak lapangan kerja tercipta, sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal ini konsisten dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa ekspansi ekonomi akan meningkatkan investasi, produksi, dan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor jumlah penduduk, IPM, kebijakan upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dalam konteks Kota Jambi, analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang strategi kebijakan yang efektif dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum kota, dan pertumbuhan ekonomi sektoral. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Kota Jambi menghadapi dinamika populasi dan pasar kerja yang kompleks, di mana kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar sering menjadi penyebab utama Tingkat Pengangguran. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat perbedaan penting, karena penelitian ini tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, melainkan pertumbuhan ekonomi secara sektoral yakni, sektor agriculture/pertanian, sektor

industri/manufactur, dan sektor service/jasa. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing sektor berkontribusi terhadap Tingkat Pengangguran terbuka, mengingat bahwa setiap sektor memiliki peran yang berbeda dalam menciptakan lapangan kerja.

Penelitian ini juga diperkirakan akan memberikan lebih banyak pencerahan mengenai bagaimana ekspansi sektor ekonomi mempengaruhi jumlah pengangguran terbuka dan memperjelas dinamika pasar tenaga kerja. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap hubungan antara faktor-faktor tersebut dan memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dalam menangani Tingkat Pengangguran. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam tesis berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kota, dan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi”** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk masalah Tingkat Pengangguran di daerah perkotaan.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan tersebut dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas:

1. Bagaimana kondisi pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kota, dan pertumbuhan ekonomi sektoral di Kota Jambi selama periode 2000-2023 ?

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kota, dan pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Jambi dalam periode 2000-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, peneliti merumuskan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis kondisi pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kota (UMK), dan pertumbuhan ekonomi sektoral serta keterkaitannya dengan tingkat pengangguran terbuka di Kota Jambi dalam kurun waktu 2000-2023.
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kota (UMK), dan pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Jambi selama periode 2000-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Para akademisi di masa depan dapat menggunakan informasi ini sebagai landasan untuk penelitian mereka mengenai tingkat pengangguran, dan pemerintah dapat menggunakannya untuk merumuskan kebijakan. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Secara akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah, khususnya dalam penelitian yang membahas topik tingkat pengangguran.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bahan perbandingan dalam studi terkait permasalahan makro mengenai tingkat pengangguran.
2. Secara praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya pemerintah daerah Kota Jambi, dalam mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran di daerah tersebut.
 - b. Para pengambil kebijakan juga diharapkan mempertimbangkan temuan studi ini ketika merumuskan kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.